



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 92
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 92), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II




Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SURIANSYAH, M. AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAIMUDDIN HZ, M. SI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAH JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABdul MAQJID S, M. SI	KARO ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 66

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARD HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MADJID S, M.Si	KARD ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 66

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 66 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 92 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO PEMERINTAHAN UMUM

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Biro Pemerintahan Umum	1					
	1. Kepala Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum		1				
	a. Kepala Tata Usaha Biro			1			
	1) Analis Perencanaan				1		
	2) Analis Barang Milik Negara				1		
	3) Analis Pengelolaan Keuangan				1		
	4) Pengelola Keuangan				1		
	5) Pengelola Kepegawaian				1		
	6) Pengadministrasi Keuangan				1		
	7) Pengadministrasi Umum				1		
	b. Kepala Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan			1			
	1) Analis Dekonsetrasi				1		
	c. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan			1			
	1) Pengelola Administrasi Pemerintahan				1		

2.	Kepala Bagian Penataan Daerah dan Pertanahan		1			
	a. Kepala Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah			1		
	1) Analis Pengembangan Wilayah				1	
	b. Kepala Subbagian Pertanahan			1		
	1) Analis Hukum Pertanahan				1	
	c. Kepala Subbagian Batas Daerah dan Toponimi			1		
	1) Analis Data dan Informasi				1	
3.	Kepala Bagian Otonomi Daerah		1			
	a. Kepala Subbagian Administrasi Pejabat Negara dan Legislatif			1		
	1) Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah				1	
	b. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan			1		
	1) Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1	
	c. Kepala Subbagian Fasilitasi Urusan Pemerintahan			1		
	1) Pengelola Otonomi Daerah				1	
	Jumlah	1	3	9	15	
	Jumlah Total			28		

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO HUKUM

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Biro Hukum	1					
	1. Kepala Bagian Produk Hukum Daerah		1				
	a. Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah			1			
	1) Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan				2		
	2) Analis Hukum				2		
	b. Kepala Sub Bagian Peraturan Kepala Daerah			1			
	1) Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan				1		
	2) Analis Hukum				1		
	2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia		1				
	a. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia			1			
	1) Analis Advokasi Hukum				1		
	2) Analis Hukum				1		
	b. Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum			1			
	1) Analis Hukum				1		
	2) Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum				1		
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Kepala Bagian Pembinaan, Pengawasan, Dan Informasi Hukum		1				
a. Kepala Sub Bagian Pembinaan Dan Pengawasan			1			
1) Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan				1		
2) Analis Hukum				1		
b. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum			1			
1) Analis Data Dan Informasi				1		
2) Penelaah Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum				1		
c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro			1			
1) Analis Perencanaan				1		
2) Analis Pengelolaan Keuangan				1		
3) Analis Barang Milik Negara				1		
4) Pengelola Keuangan				2		
5) Pengadministrasi Keuangan				1		
6) Pengelola Kepegawaian				1		
7) Pengadministrasi Umum				3		
4. Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Pranata Komputer Pertama					1	
b. Penyuluh Hukum Pertama					2	
c. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama					2	
Jumlah	1	3	7	24	5	
Jumlah Total			40			

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Biro	1					
	1. Kepala Bagian Keagamaan		1				
	a. Kepala Subbagian Bina Keagamaan, Pendidikan Agama dan Saran Keagamaan			1			
	1) Analis Dana Haji				2		
	2) Analis Bina Kehidupan Beragama				1		
	3) Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah				1		
	b. Kepala Sub Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengadministrasi Keuangan				2		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	4) Analis Perencanaan				1		
	5) Analis Notifikasi				1		
	6) Analis Perencanaan				1		
	7) Analis Barang Milik Negara				1		
	8) Analis Data dan Informasi				1		
	9) Pengelola Kepegawaian				1		
	10) Pengelola Keuangan				2		
	11) Pranata Komputer Pertama					1	
	12) Pranata Komputer Muda					1	
	2. Kepala Bagian Kesejahteraan		1				
	a. Kepala Subbagian Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba			1			
	1) Analis Kesehatan				1		
	2) Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah				1		
	b. Kepala Subbagian Sosial, Pemukiman, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1			
	1) Analis Kesejahteraan Rakyat				1		
	2) Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah				1		

	3. Kepala Bagian Kemasyarakatan		1				
	a. Kepala Subbagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kelembagaan Kemasyarakatan			1			
	1) Analis Kemasyarakatan				1		
	2) Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah				2		
	b. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB			1			
	1) Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak				1		
	Jumlah	1	3	6	25	2	
	Jumlah Total			37			

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO PEREKONOMIAN

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PEGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Biro Perekonomian	1					
	1. Kepala Bagian Sarana Perekonomian		1				
	a. Kepala Subbagian Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan			1			
	1) Penelaah Perkembangan BUMD				1		
	2) Analis Perekonomian				1		
	b. Kepala Subbagian Penanaman Modal dan Promosi			1			
	1) Analis Penanaman Modal				1		
	2) Analis Pengembangan Potensi Daerah				1		
	c. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro			1			
	1) Analis Perencanaan				1		
	2) Pengadministrasi Umum				1		
	3) Analis Barang Milik Negara				1		
	4) Pengadministrasi Keuangan				1		
	5) Analis Pengelolaan Keuangan				1		
	6) Pengelola Kepegawaian				1		
	7) Pengelola Keuangan				1		
	2. Kepala Bagian Industri dan Jasa		1				
	a. Kepala Subbagian Perindustrian, Koperasi dan UKM			1			
	1) Analis Akses Industri				1		
	2) Analis Koperasi				1		
	b. Kepala Subbagian Perhubungan dan Pariwisata			1			
	1) Analis Perhubungan dan Komunikasi				1		
	2) Analis Pariwisata				1		
	3) Analis Data dan Informasi						

3.	Kepala Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam		1			
	a. Kepala Subbagian Pertanian dan Ketahanan Pangan			1		
	1) Pengelola Ketahanan Pangan				1	
	2) Analis Pangan				1	
	b. Kepala Subbagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			1		
	1) Analis Lingkungan Hidup				1	
	2) Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup				1	
	c. Kepala Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral			1		
	1) Analis Pengembangan Energi				1	
	2) Analis Data dan Informasi				1	
4.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	a. Pranata Komputer Pertama					1
	b. Pranata Komputer Muda					1
	Jumlah	1	3	8	22	2
	Jumlah Total					36

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO PEMBANGUNAN

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Biro Pembangunan	1					
	1. Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan dan Kerjasama		1				
	a. Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah			1			
	1) Analis Perencanaan				2		
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2		
	b. Kepala Sub Bagian Kerjasama			1			
	1) Analis Kerjasama Lintas Sektor				2		
	2) Pengelola Informasi Kerjasama				1		
	c. Kepala sub Bagian Tata Usaha Biro			1			
	1) Pengelola Kepegawaian				2		
	2) Verifikator Keuangan				2		
	3) Pengadministrasi Umum				3		
	4) Analis Data dan Informasi				3		
	5) Analis Pengelolaan Keuangan				2		
	6) Analis Barang Milik Negara				1		
	2. Kepala Bagian Pengendalian dan Pelaporan		1				
	a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan			1			
	1) Analis Laporan Realisasi Anggaran				2		
	2) Pengadministrasi sistem informasi pengendalian pembangunan				2		
	b. Kepala Sub Bagian Pelaporan			1			
	1) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				2		
	2) Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD				2		

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Biro	1					
	1. Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara		1				
	a. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Batas Negara			1			
	1) Analis Pengembangan dan Penataan Batas Wilayah				1		
	2) Pengelola Informasi Lintas Batas Negara				1		
	b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro			1			
	1) Analis Perencanaan				1		
	2) Analis Barang Milik Negara				1		
	3) Analis Pengelolaan Keuangan				1		
	4) Pengelola Kepegawaian				1		
	5) Pengadministrasi Umum				1		
	6) Pengelola Keuangan				2		
	7) Pengadministrasi Keuangan				1		
	2. Kepala Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan		1				
	a. Kepala Sub Bagian Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam			1			
	1) Analis Pengembangan Potensi Daerah				1		
	2) Pengelola Data				1		
	b. Kepala Sub Bagian Potensi Sosial dan Budaya			1			
	1) Analis Sosial Budaya				1		
	2) Pengelola Data				1		
	3. Kepala Bagian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan		1				

	a. Kepala Sub Bagian Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya			1			
	1) Analis Pengembangan Potensi Daerah				1		
	2) Pengelola Data				1		
	b. Kepala Sub Bagian Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan			1			
	1) Analis Infrastruktur				1		
	2) Pengelola Data				1		
	Jumlah	1	3	6	18		
				28			

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO ORGANISASI

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala biro	1					
	1. Kepala Bagian Kelembagaan		1				
	a. Kepala Subbagian Fasilitas Kelembagaan			1			
	1) Analis Kelembagaan				2		
	b. Kepala Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan			1			
	1) Analis Jabatan				1		
	2) Analis Data dan Informasi				1		
	2. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha		1				
	a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas			1			
	1) Analis Pengembangan SDM Aparatur				1		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro			1			
	1) Pengadministrasi Keuangan				1		
	2) Pengadministrasi Umum				2		
	3) Analis Perencanaan				1		
	4) Pengelola Keuangan				1		
	5) Analis Pengelola Keuangan				1		
	6) Analis Barang Milik Negara				1		
	3. Kepala Bagian Ketatalaksanaan, Inovasi dan AKIP		1				
	a. Kepala Sub Bagian Sistem Prosedur dan Standarisasi			1			
	1) Analis Tata Laksana				1		

	2) Analis Kerjasama Teknis Standardisasi				1		
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Kepala Sub Bagian Inovasi Pelayanan Publik			1			
	1) Analis Layanan Umum				1		
	2) Pengelola Data				1		
	c. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			1			
	1) Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur				1		
	2) Pengelola Akuntabilitas				1		
	Jumlah	1	3	7	19		
	Jumlah Total				31		

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Biro	1					
	1. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro dan Perjalanan Dinas			1			
	1) Analis Data dan Informasi				2		
	2) Analis Perencanaan				2		
	3) Pengadmistrasi Umum				1		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	b. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli			1			
	1) Analis Data dan Informasi				2		
	2) Penyusun Naskah Rapat Pimpinan				3		
	3) Ajudan				3		
	4) Pranata Jamuan				2		
	5) Pengadministrasi Umum				6		
	6) Pengemudi				6		
	c. Kepala Subbagian Rumah Tangga Pimpinan			1			
	1) Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan				3		
	2) Pranata Jamuan				3		
	2. Kepala Bagian Keuangan		1				
	a. Kepala Subbagian Anggaran			1			
	1) Analis Perencanaan Anggaran				2		
	2) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				2		
	3) Pengelola Keuangan				2		
	b. Kepala Subbagian Akuntansi			1			
	1) Analis Sistem Akuntansi Instansi				2		

	2) Pengelola Akuntansi				2		
	3) Pengadministrasi Keuangan				1		
	c. Kepala Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Verifikator Keuangan				5		
	3) Pengelola Keuangan				2		
	4) Pengadministrasi Keuangan				1		
	3. Kepala Bagian Perlengkapan		1				
	a. Kepala Subbagian Inventarisasi, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan			1			
	1) Analis Barang Milik Negara				2		
	2) Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				4		
	3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				4		
	b. Kepala Subbagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan			1			
	1) Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana				3		
	2) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				2		
	4. Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Pranata Komputer Pertama						1
	Jumlah	1	3	8	69	1	
	Jumlah Total				82		

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Biro	1					
	1. Kepala Bagian Humas		1				
	a. Kepala Sub Bagian Interna Eksternal			1			
	1) Analis Kerjasama				3		
	2) Pengadministrasi Rapat				1		
	b. Kepala Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi			1			
	1) Analis Publikasi				3		
	2) Analis Humas				1		
	3) Analis Data dan Informasi				1		
	4) Pengelola Data				1		
	c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Analis Perencanaan				1		
	2) Analis Barang Milik Negara				1		
	3) Analis Pengelola Keuangan				1		
	4) Analis Notifikasi				1		
	5) Pengelola Kepegawaian				1		
	6) Pengadministrasi Keuangan				1		
	7) Pengadministrasi Umum				1		
	2. Kepala Bagian Protokol		1				
	a. Kepala Sub Bagian Tata Acara			1			
	1) Analis Protokol				2		
	2) Petugas Protokol				2		
	3) Pranata Acara				2		
	b. Kepala Sub bagian Pelayanan Kegiatan Pimpinan			1			
	1) Analis Pelayanan				2		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Analis Protokol				1		

	c. Kepala Sub bagian Pelayanan Kegiatan Tamu			1			
	1) Analis Protokol				1		
	2) Analis Pelayanan				1		
	3. Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Pranata Humas Pertama					5	
	b. Arsiparis Pertama					1	
	Jumlah	1	2	6	28	6	
	Jumlah Total			43			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE



c. Kepala Sub bagian Pelayanan Kegiatan Tamu			1			
1) Analis Protokol				1		
2) Analis Pelayanan				1		
3. Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Pranata Humas Pertama					5	
b. Arsiparis Pertama					1	
Jumlah	1	2	6	28	6	
Jumlah Total			43			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	TAMBAH
1	Dr.H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAHUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARD HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAQJIDS, M.Si	KARD ORGANISASI	

c. Kepala Sub bagian Pelayanan Kegiatan Tamu			1			
1) Analis Protokol				1		
2) Analis Pelayanan				1		
3. Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Pranata Humas Pertama					5	
b. Arsiparis Pertama					1	
Jumlah	1	2	6	28	6	
Jumlah Total			43			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 66

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H. ZAHUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARD HUKUM	
3	Drs.H. ABDUL MAJID S. M.Si	KARD ORGANISASI	

c. Kepala Sub bagian Pelayanan Kegiatan Tamu			1			
1) Analis Protokol				1		
2) Analis Pelayanan				1		
3. Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Pranata Humas Pertama					5	
b. Arsiparis Pertama					1	
Jumlah	1	2	6	28	6	
Jumlah Total			43			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

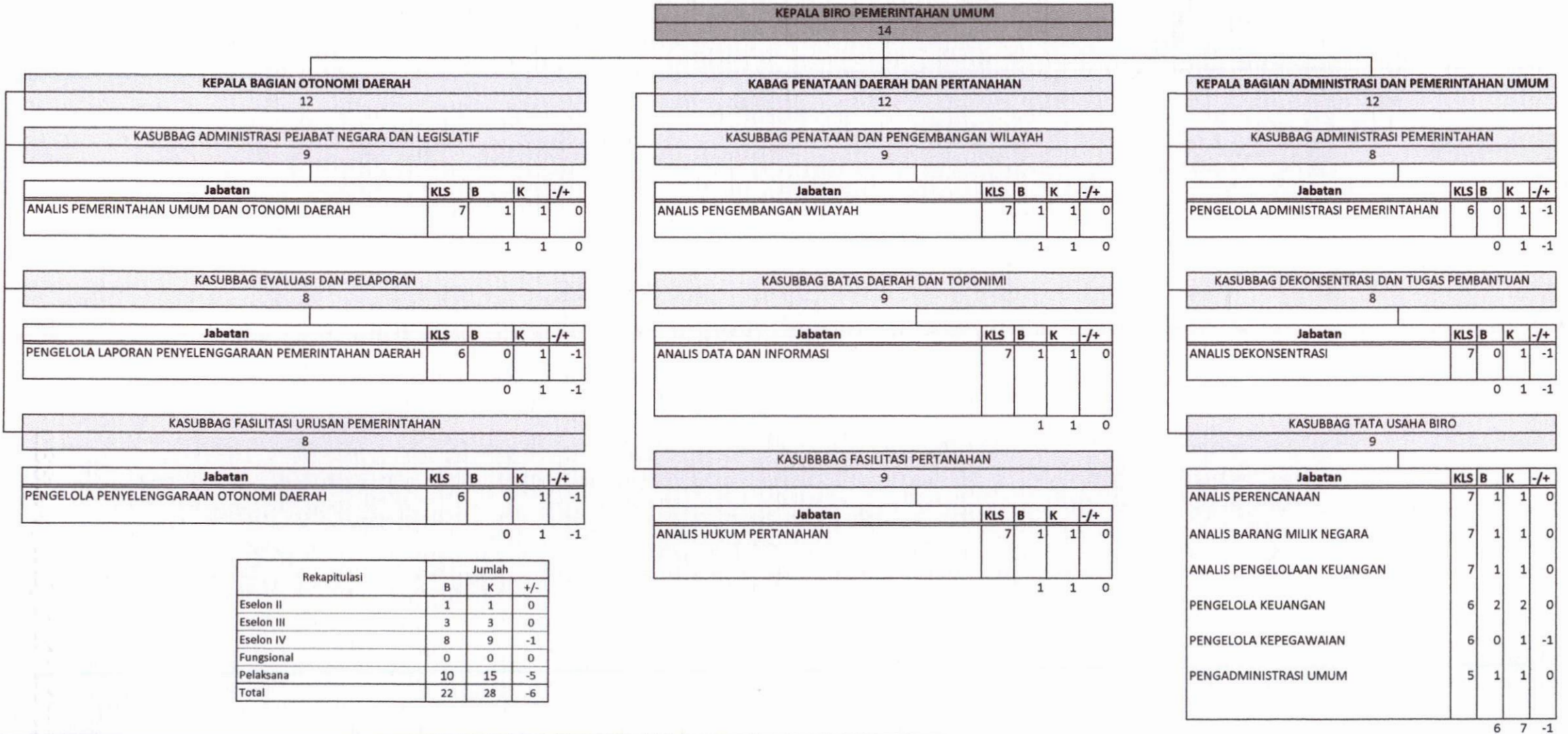
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 66 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 92 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH

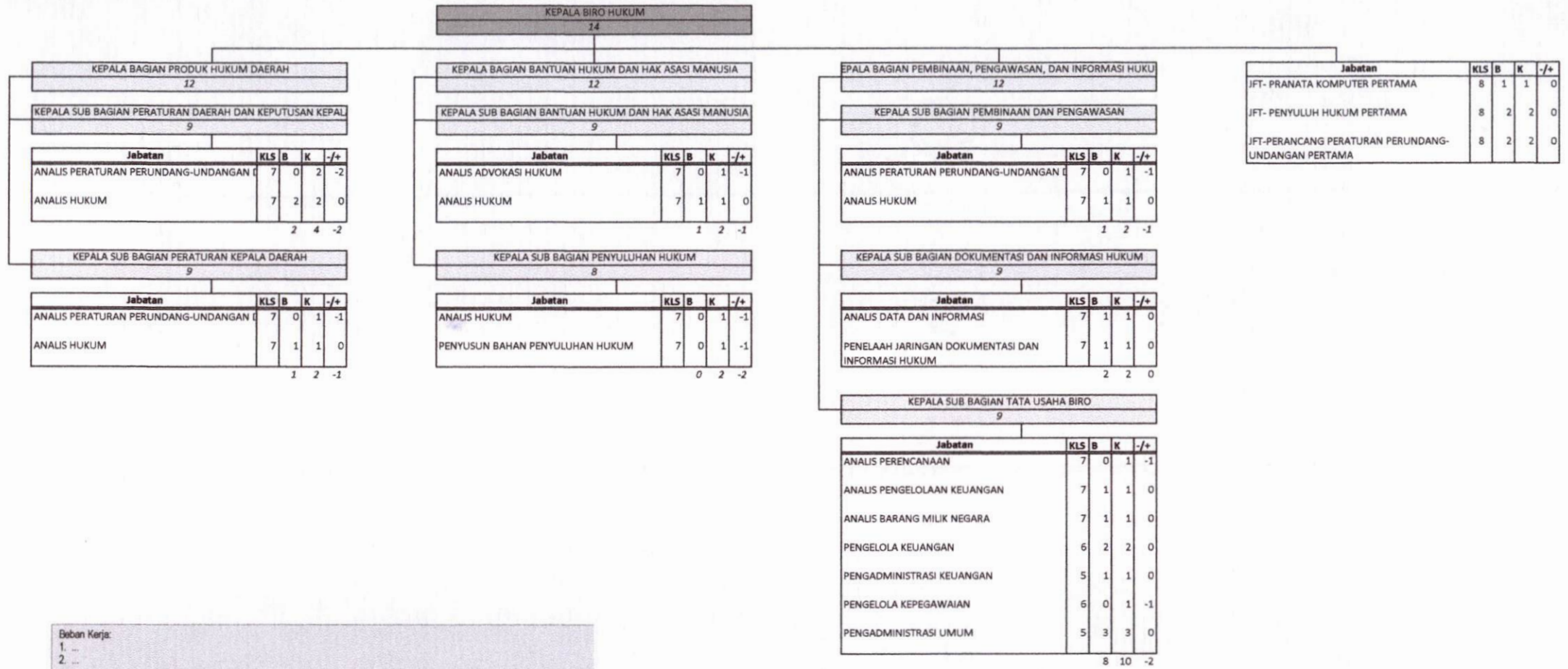
PETA JABATAN BIRO PEMERINTAHAN UMUM



Keterangan

1. Jabatan Pengelola Keuangan dalam tahap pengajuan penggantian nama jabatan

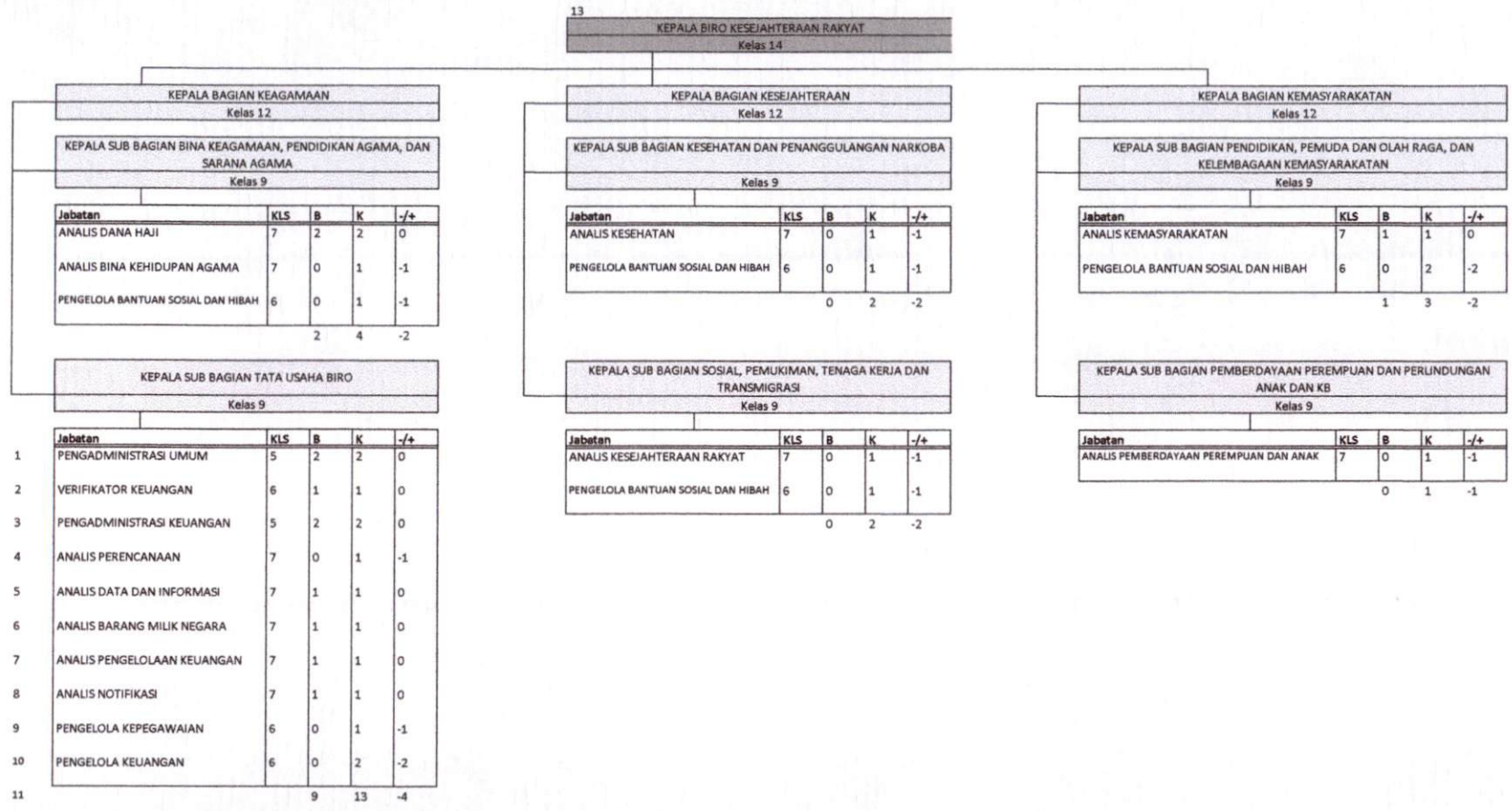
PETA JABATAN BIRO HUKUM



Jabatan	KLS	B	K	-/+
JFT- PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	1	1	0
JFT- PENYULUH HUKUM PERTAMA	8	2	2	0
JFT-PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA	8	2	2	0

Beban Kerja:
 1. ...
 2. ...

PETA JABATAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



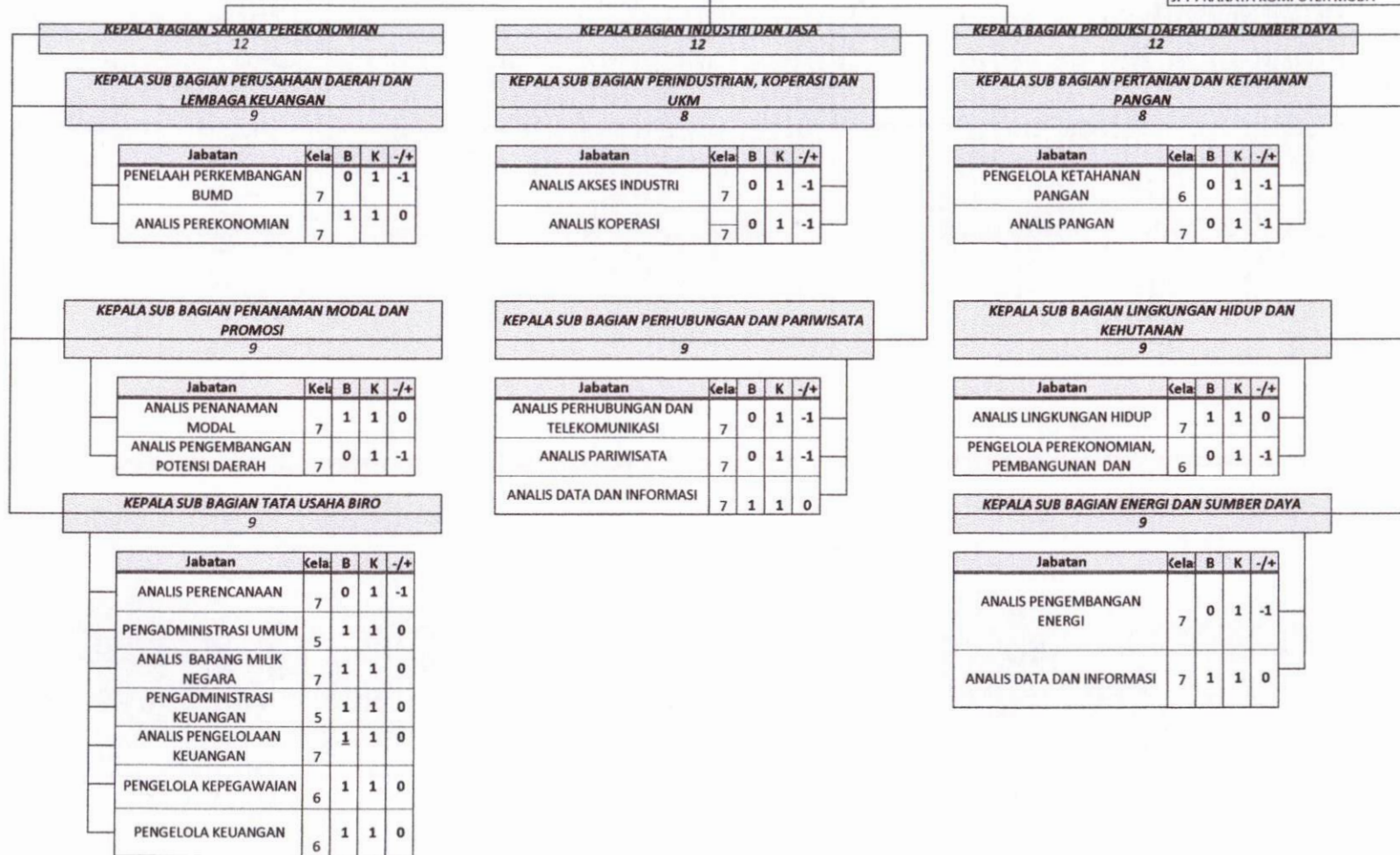
Jabatan	KLS	B	K	-/+
PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	1	1	0
PRANATA KOMPUTER MUDA	9	0	1	-1
		1	2	-1

Beban Kerja:
 1. ...
 2. ...

PETA JABATAN BIRO PEREKONOMIAN

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
14

JFT				
Jabatan	Kelas	B	K	-/+
JFT PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	1	1	0
JFT PRANATA KOMPUTER MUDA	9	0	1	-1

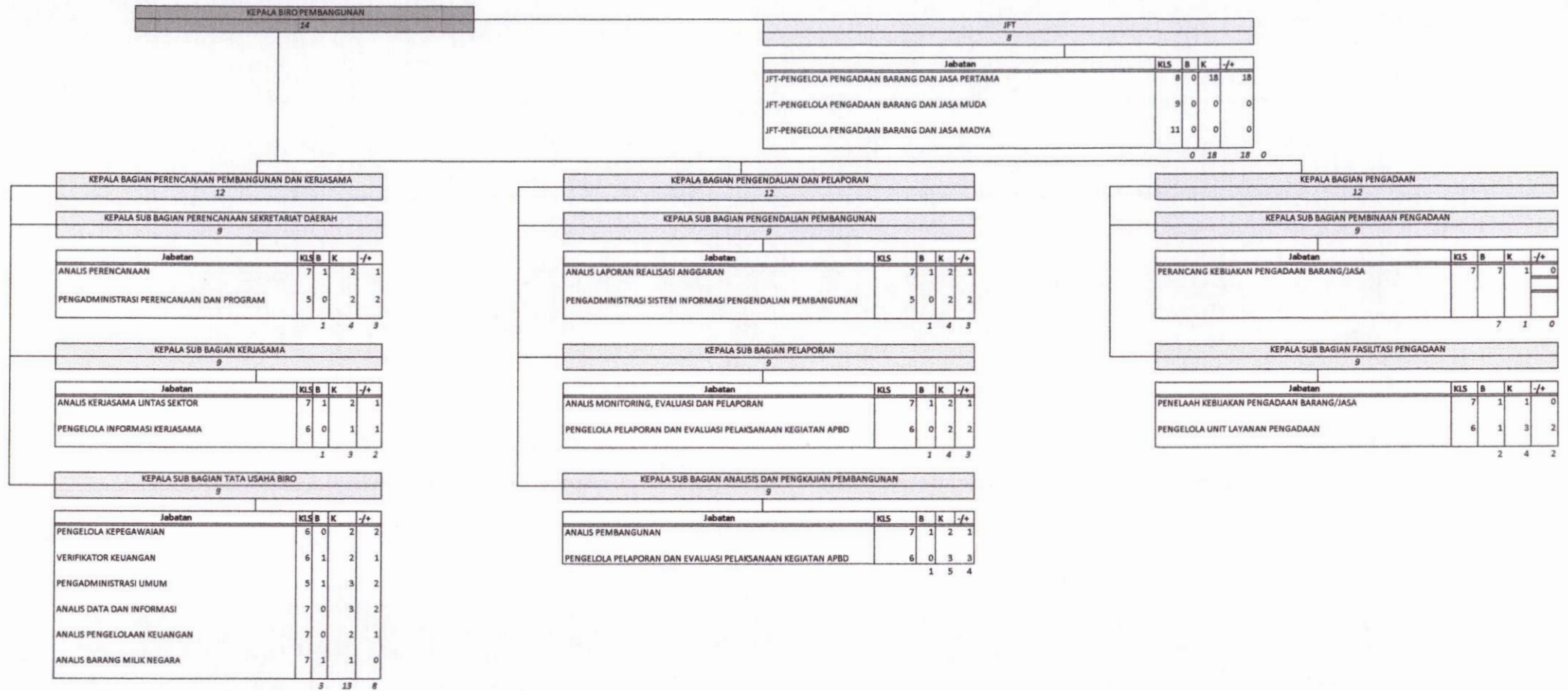


Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	-/+
Eselon II	1	1	0
Eselon III	3	3	0
Eselon IV	7	8	-1
Fungsional	1	2	-1
Pelaksana	11	22	-11
Kurang	23	36	-13

Catatan :

- **Jabatan** = Tulislah Nama Jabatan yang ada atau yang dibutuhkan
- **B** = Tulislah Jumlah Pegawai Yang Ada
- **K** = Tulislah Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja
- **-/+** : Tulislah Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pegawai

PETA JABATAN BIRO PEMBANGUNAN



PETA JABATAN BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

15 KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

14

KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BATAS NEGARA
12

KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN BATAS NEGARA
9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PENGEMBANGAN DAN PENATAAN BATAS ANTAR NEGARA	7	1	1	0
PENGELOLA INFORMASI LINTAS BATAS NEGARA	6	1	1	0
	2	2	0	

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PERENCANAAN	7	0	1	-1
ANALIS BARANG MILIK NEGARA	7	1	1	0
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN	7	1	1	0
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	0	1	-1
PENGELOLA KEUANGAN	6	2	2	0
PENGADMINISTRASI UMUM	5	1	1	0
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1	1	0
	6	8		

KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN
12

KEPALA SUB BAGIAN POTENSI EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	7	1	1	0
PENGELOLA DATA	6	1	1	0
	2	2	0	

KEPALA SUB BAGIAN POTENSI SOSIAL DAN BUDAYA
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS SOSIAL BUDAYA	7	1	1	0
PENGELOLA DATA	6	1	1	0
	2	2	0	

KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN
12

KEPALA SUB BAGIAN INFRASTRUKTUR EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	7	1	1	0
PENGELOLA DATA	6	1	1	0
	2	2	0	

KEPALA SUB BAGIAN INFRASTRUKTUR FISIK DAN PEMERINTAHAN
Kelas 8

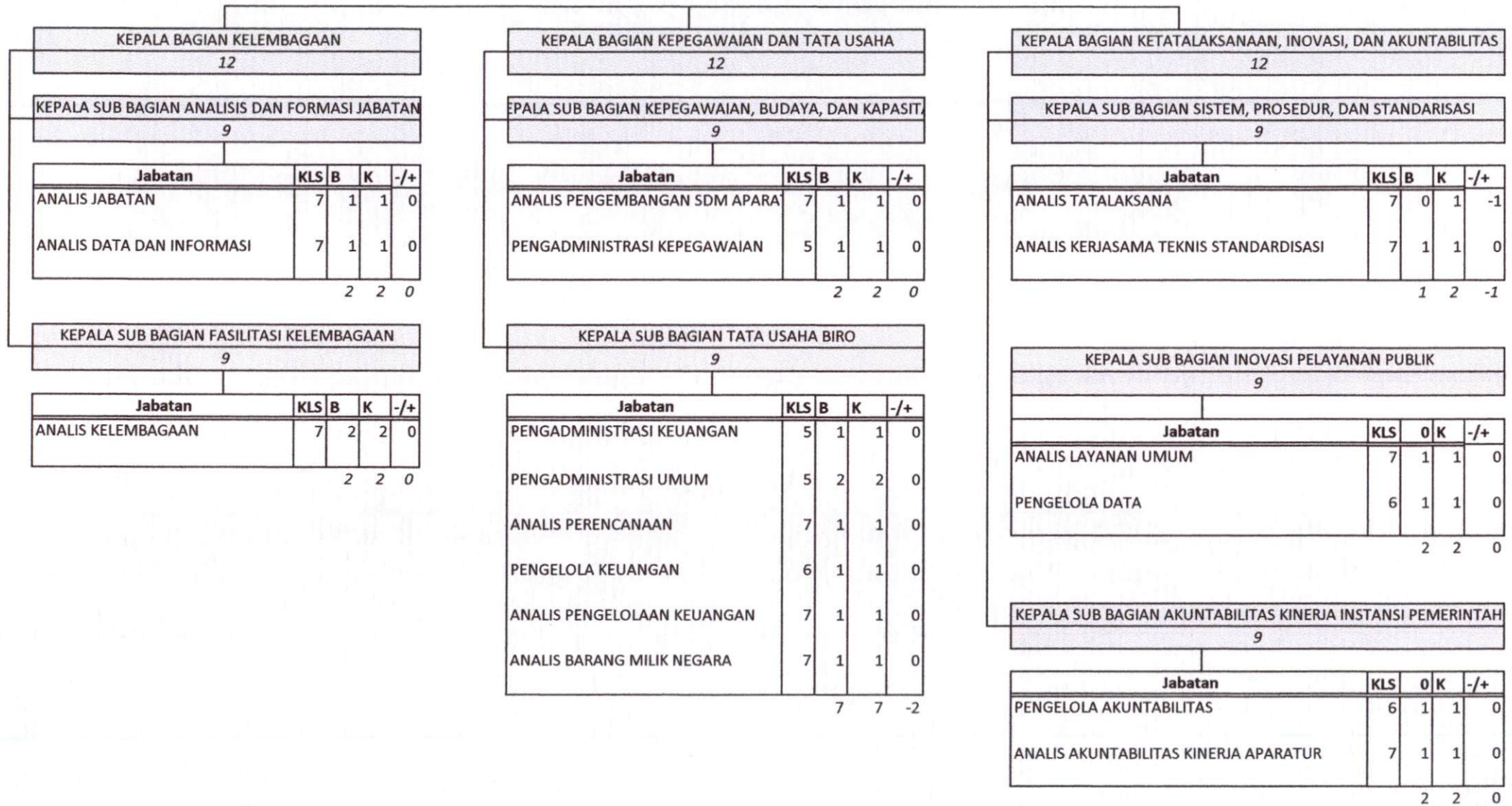
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS INFRASTRUKTUR	7	0	1	1
PENGELOLA DATA	6	1	1	0
	1	2	1	

PETA JABATAN BIRO ORGANISASI

18

KEPALA BIRO ORGANISASI

14



PETA JABATAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan
15

Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga
11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Perjalanan Dinas
9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Data dan Informasi	7	1	2	-1
Analisis Perencanaan	7	3	2	1
Pengadministrasian Umum	5	1	1	0
Pengadministrasian Kepegawaian	5	0	1	-1
5 6 -1				

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli
9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Data dan Informasi	7	5	2	3
Penyusunan Naskah Rapat pimpinan	7	2	3	-1
Ajudan	6	0	3	-3
Pranata Jamuan	6	0	2	-2
Pengadministrasian Umum	5	2	6	-4
Pengemudi	5	1	6	-5
10 22 -12				

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan
9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penyusunan Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	2	3	-1
Pranata Jamuan	6	0	3	-3
2 6 -4				

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
11

Kepala Sub Bagian Anggaran
9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Perencanaan Anggaran	7	1	2	-1
Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	7	0	2	-2
Pengelola Keuangan	6	1	2	-1
2 6 -4				

Kepala Sub Bagian Akuntansi
9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Sistem Akuntansi Instansi	7	1	2	-1
Pengelola Akuntansi	6	0	2	-2
Pengadministrasian Keuangan	5	1	1	0
2 5 -3				

Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Bendahara	7	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	5	-5
Pengelola Keuangan	6	1	2	-1
Pengadministrasian Keuangan	5	1	1	0
3 9 -6				

Kepala Bagian Perlengkapan
11

Kepala Sub Bagian Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pemeliharaan
9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Barang Milik Negara	7	1	2	-1
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0	4	-4
Teknisi Pemeliharaan Sarana Prasarana	5	4	4	0
5 10 -5				

Kepala Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan
9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penyusunan Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	1	3	-2
Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	1	2	-1
2 5 -3				

Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pranata Komputer	8	0	1	-1

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	3	3	0
Eselon IV	8	8	0
Fungsional	0	1	-1
Pelaksana	31	69	-38
Kurang	43	82	-39

PETA JABATAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Kepala Biro Humas dan Protokol
15



Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
JFT Pranata Humas Pertama	8	5	5	0
JFT Arsiparis	8	1	1	0

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	0	2	-2
Eselon IV	4	6	-2
Fungsional	6	6	0
Pelaksana	20	28	-8
Kurang	31	43	-12

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Kepala Biro Humas dan Protokol
15

Kepala Bagian Protokol				
12				
Kepala Sub Bagian Tata Acara				
9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Protokol	7	1	2	-1
Petugas Protokol	5	0	2	-2
Pranata Acara	6	0	2	-2
		1	6	-5
Kepala Sub Bagian Pelayanan Kegiatan Pimpinan				
9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Protokol	7	0	1	-1
Analisis Pelayanan	7	2	2	0
		2	3	-1
Kepala Sub Bagian Pelayanan Kegiatan tamu				
9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Protokol	7	1	1	0
Analisis Pelayanan	7	0	1	-1
		1	2	-1

Kepala Bagian Humas				
12				
Kepala Sub Bagian Hubungan Eksternal dan Internal				
9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Kerjasama	7	3	3	0
Pengadministrasian Rapat	5	0	1	-1
		3	4	-1
Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Informasi, dan Publikasi				
9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Publikasi	7	3	3	0
Analisis Humas	7	1	1	0
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Pengelola Data	6	1	1	0
		6	6	0
Kepala Sub Bagian Tata Usaha				
9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Perencanaan	7	1	1	0
Analisis Barang Milik Negara	7	1	1	0
Analisis Pengelola Keuangan	7	1	1	0
Analisis Notifikasi	7	1	1	0
Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0
Pengadministrasian Keuangan	5	1	1	0
Pengadministrasian Umum	5	1	1	0
		7	7	0

Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
JFT Pranata Humas Pertama	8	5	5	0
JFT Arsiparis	8	1	1	0

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	0	2	-2
Eselon IV	4	6	-2
Fungsional	6	6	0
Pelaksana	20	28	-8
Kurang	31	43	-12

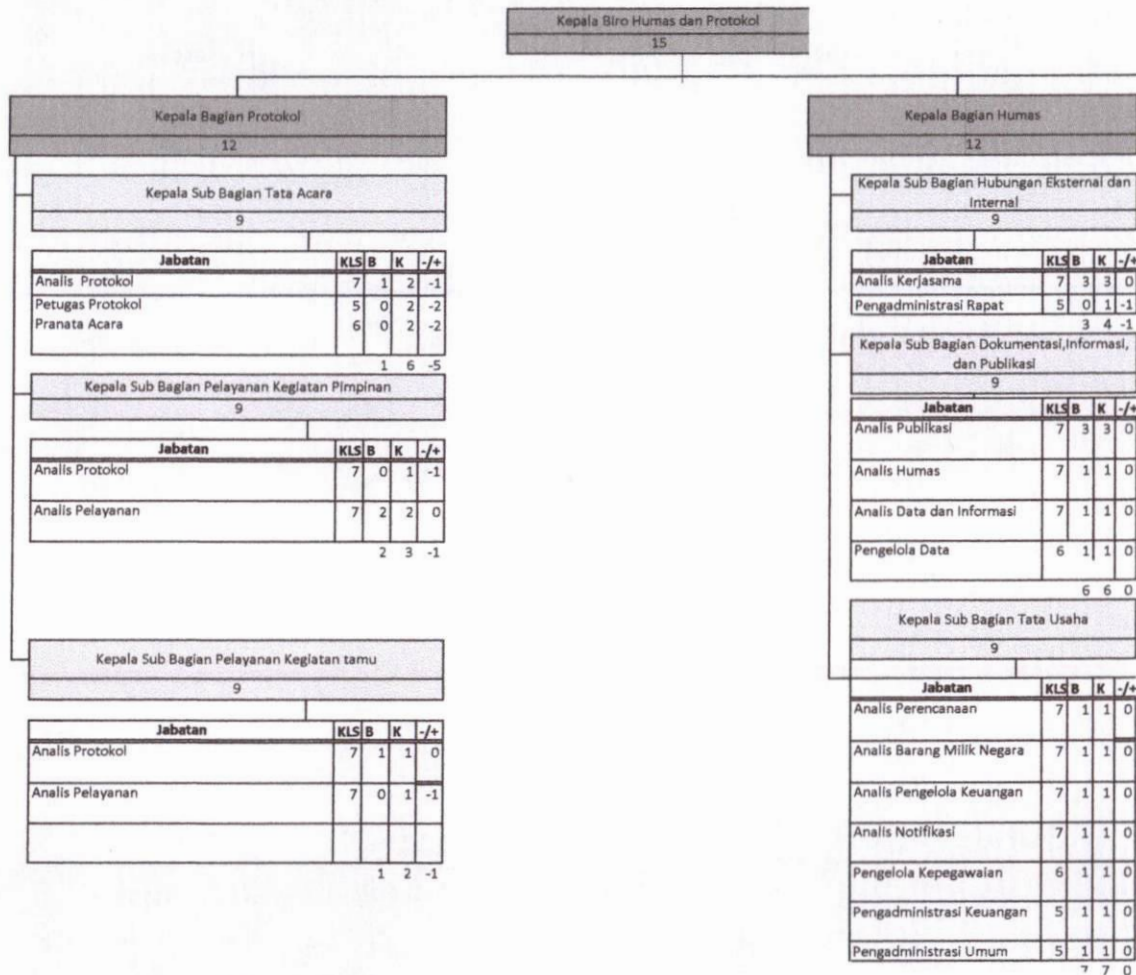
No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SURIANSYAH, M. AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAINUDDIN H2, M. Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAJIDS, M. Si	KARO ORGANISASI	

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
JFT Pranata Humas Pertama	8	5	5	0
JFT Arsiparis	8	1	1	0

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DRS. H. ZAHUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	<i>N</i>
3	DRS. H. ABDUL MARJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	0	2	-2
Eselon IV	4	6	-2
Fungsional	6	6	0
Pelaksana	20	28	-8
Kurang	31	43	-12

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

[Signature]
SURIANSYAH

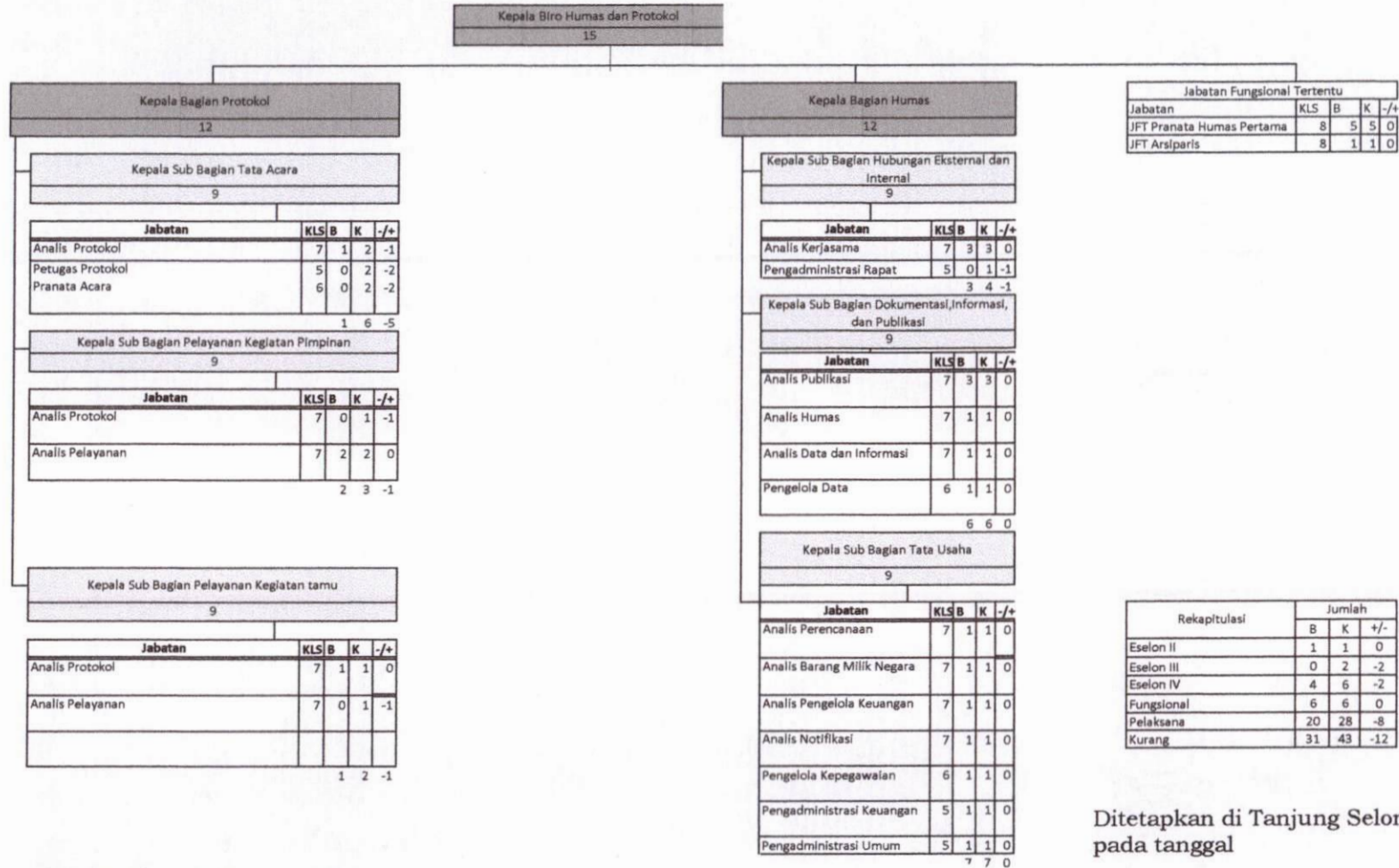
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE